



Gerakan Sosial dan Konflik Kebijakan Eksploitasi Geotermal di Desa Sokoria Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende

Samsi Duha^{1*}, Wahid Hasyim T.R.A Beni², BacoTang³ Khaidir⁴, Idris Mboka⁵

Corresponding Author Email: samsiduha30@gmail.com

Article History

Manuscript submitted:
03 April 2026
Manuscript revised:
23 Mei 2026
Accepted for publication:
21 Juni 2026

Keywords

Social Change; Social Conflict; Social Movement; Community Response; Geothermal, Sokoria.

Kata Kunci

Perubahan Sosial; Konflik Sosial; Gerakan Sosial; Respons Masyarakat; Panas Bumi; Sokoria.

Abstract

Geothermal exploitation in Sokoria Village, East Ndona District, Ende Regency has generated social consequences beyond physical development, particularly in relation to social structure, power relations, cultural values, and community interaction patterns. The project has also raised tensions due to unequal participation, limited transparency, and different community interests. This study aims to analyze social change, social conflict, social movements, and community responses to geothermal exploitation policies in Sokoria Village. This research used a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving local communities, traditional leaders, village government officials, PMKRI activists, environmental activists, and other related parties. The findings show that geothermal exploitation has triggered multidimensional social change, including the shifting role of Mosalaki in decision-making, the transformation of land meaning from cultural value to economic value, and social fragmentation within the community. These changes contributed to social conflict and encouraged social movements as efforts to defend living space and demand social justice. Community responses varied, including acceptance, rejection, negotiation, and adaptation. This study recommends stronger transparency, inclusive participation, and culturally sensitive development policies in managing geothermal projects.

Abstrak

Eksploitasi panas bumi di Desa Sokoria, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende menimbulkan konsekuensi sosial yang melampaui pembangunan fisik, terutama terkait struktur sosial, relasi kuasa, nilai budaya, dan pola interaksi masyarakat. Proyek ini juga memunculkan ketegangan karena partisipasi yang tidak setara, keterbatasan transparansi, dan perbedaan kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan sosial, konflik sosial, gerakan sosial, dan respons masyarakat terhadap kebijakan eksploitasi panas bumi di Desa Sokoria. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan masyarakat lokal, tokoh adat, pemerintah desa, aktivis PMKRI, aktivis lingkungan, dan pihak terkait lainnya. Temuan menunjukkan bahwa eksploitasi panas bumi memicu perubahan sosial multidimensional,

¹ Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

⁴ Universitas Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

⁵ Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

meliputi pergeseran peran Mosalaki dalam pengambilan keputusan, transformasi makna tanah dari nilai budaya menjadi nilai ekonomi, serta fragmentasi sosial dalam masyarakat. Perubahan tersebut berkontribusi terhadap konflik sosial dan mendorong lahirnya gerakan sosial sebagai upaya mempertahankan ruang hidup dan menuntut keadilan sosial. Respons masyarakat beragam, mencakup penerimaan, penolakan, negosiasi, dan adaptasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan transparansi, partisipasi inklusif, dan kebijakan pembangunan yang peka budaya dalam pengelolaan proyek panas bumi agar dampak sosial dapat dikelola secara lebih adil, akuntabel, dan berkelanjutan lokal

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the BY-NC-ND license



Contents

Abstrak	210
Pendahuluan.....	211
Metode.....	212
Hasil dan Pembahasan.....	213
Kesimpulan.....	216
Daftar Pustaka.....	217

III

Pendahuluan

Isu geotermal di Kabupaten Ende juga menunjukkan dinamika yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Sejak tahun 2011 hingga 2025, berbagai aksi dan penyampaian aspirasi terkait proyek geotermal telah terjadi, baik di tingkat lokal maupun kabupaten. Aksi-aksi tersebut melibatkan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat tertentu (AMAN, 2023; Project Multatuli, 2024; RRI, 2025). Demonstrasi umumnya dilakukan di ruang-ruang publik seperti Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Ende sebagai bentuk upaya untuk menarik perhatian pemerintah dan publik. Menariknya, Desa Sokoria sebagai lokasi proyek utama tidak selalu menjadi pusat dari aksi-aksi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara dinamika lokal dan isu mobilisasi di tingkat yang lebih luas. Dalam banyak kasus, aktor eksternal seperti mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam mengangkat isu lokal ke tingkat publik yang lebih luas.

Dari perspektif sosial ekonomi dan lingkungan, persepsi masyarakat terhadap proyek geotermal juga sangat beragam. Sebagian masyarakat belum merasakan dampak negatif secara langsung, sehingga cenderung terkesan netral atau bahkan mendukung. Sementara itu, kelompok lain lebih menyoroti potensi risiko terhadap sumber daya alam yang menjadi landasan kehidupan mereka, seperti udara dan lahan pertanian. Selain itu, isu pendistribusian manfaat juga menjadi faktor penting dalam membentuk sikap masyarakat. Ketika manfaat ekonomi hanya dirasakan oleh sebagian kelompok kecil, maka kelompok lain cenderung mengembangkan sikap kritis terhadap proyek tersebut. Dalam konteks ini, keadilan distributif menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan energi terbarukan.

Rangkaian kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika geotermal di Desa Sokoria tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai konflik terbuka antara masyarakat dan perusahaan. Sebaliknya, situasi ini mencerminkan interaksi yang kompleks antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, perusahaan, masyarakat lokal, tokoh adat, pelajar, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam konteks tersebut, munculnya gerakan sosial dapat dipahami sebagai bagian dari respon sebagian terhadap

kelompok kebijakan yang dianggap tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan mereka. Gerakan sosial ini tidak hanya melibatkan masyarakat lokal, tetapi juga aktor eksternal yang berperan dalam memperluas isu ke ruang publik (Tarrow, 2011; Tilly, 2004). Melalui berbagai bentuk aksi kolektif, mereka bertujuan mempengaruhi kebijakan serta memperjuangkan kepentingan yang dianggap terabaikan.

Lebih jauh lagi, fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif struktur peluang politik, di mana terbukanya ruang partisipasi politik dan akses terhadap media memungkinkan kelompok masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga ikut mempercepat penyebaran isu dan dukungan mobilisasi. Lebih lanjut, munculnya gerakan sosial dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk artikulasi kepentingan kelompok-kelompok yang merasa kurang terakomodasi dalam proses kebijakan. Ketimpangan dalam partisipasi, transparansi, dan distribusi manfaat pembangunan menjadi faktor yang turut mempengaruhi dinamika konflik tersebut (Fung, 2006; Fox, 2007).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara gerakan sosial dan kebijakan konflik dalam eksploitasi geotermal, khususnya dalam konteks masyarakat lokal di Desa Sokoria, Kecamatan Ndonga Timur, Kabupaten Ende. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana bentuk dan dinamika gerakan sosial yang muncul dalam konflik kebijakan eksploitasi geotermal di Desa Sokoria? 2. Bagaimana proses terbentuknya dan perkembangannya konflik kebijakan eksploitasi geotermal di Desa Sokoria? 3. Bagaimana variasi sikap masyarakat dan aktor terkait serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam konflik kebijakan eksploitasi geotermal di Desa Sokoria?.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Desa Sokoria, Kecamatan Ndonga Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif (*purposive site selection*), yaitu berdasarkan pertimbangan relevansi kasus dengan tujuan penelitian serta potensi lokasi dalam menyediakan data yang kaya dan mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, persepsi, serta dinamika sosial dari sudut pandang aktor yang terlibat. Objek penelitian ini adalah dinamika konflik kebijakan eksploitasi geotermal di Desa Sokoria sebagai suatu proses sosial-politik yang melibatkan interaksi antaraktor, perbedaan kepentingan, serta kontestasi makna dan legitimasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dan teknik *snowball sampling*. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, laporan, arsip, jurnal, dan sumber tertulis lainnya. Sumber data meliputi: 1. Informan (Masyarakat pro/kontra, pemerintah, perusahaan, aktivis lingkungan, dan organisasi PMKRI). 2. Dokumen kebijakan dan laporan resmi. 3. Arsip organisasi dan media massa. 4. Literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 1. Wawancara Mendalam 2. Observasi Lapangan 3. Studi Dokumentasi, 4. Studi Literatur. Selanjutnya, Teknik analisis data meliputi 1. Reduksi Data, 2. Penyajian Data 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Hasil dan Pembahasa

1. Korelasi dengan Teori Perubahan Sosial

Penelitian proyek geotermal di Desa Sokoria menunjukkan pembangunan tersebut memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Perubahan ini berlangsung tidak hanya pada aspek fisik, seperti infrastruktur, tetapi juga pada struktur sosial, institusi lokal, interaksi antar warga, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Temuan di Sokoria menunjukkan bahwa perubahan ini terjadi karena adanya aktor eksternal yang membawa logika pembangunan baru ke dalam sistem sosial lokal. Perubahan yang pertama kali terlihat adalah pada tatanan sosial masyarakat. Sebelum adanya proyek geotermal, struktur sosial cenderung sederhana dengan pemerintah desa dan lembaga adat sebagai otoritas utama. Akan tetapi, seiring dengan pelaksanaan proyek, struktur menjadi semakin rumit dengan adanya perusahaan energi, tenaga kerja dari luar, dan organisasi sosial yang bersifat eksternal. Hal ini mengubah pola interaksi sosial dari yang seragam menjadi lebih bervariasi dan terpecah.

Perubahan fungsi Mosalaki mencerminkan adanya pergeseran struktur kekuasaan di dalam komunitas lokal. Jika dahulu Mosalaki memiliki peran krusial dalam keputusan mengenai tanah dan aspek sosial, maka kehadiran negara dan perusahaan mengalihkan sebagian wewenang ke dalam mekanisme pembangunan yang resmi. Walaupun pengakuan adat masih ada, otoritas tradisional tidak lagi menjadi pengambil keputusan utama di Sokoria. Selaras dengan itu, transformasi juga tampak dalam cara masyarakat memahami tanah. Tanah yang dulunya dianggap sebagai unsur identitas budaya dan warisan nenek moyang mulai bertransformasi menjadi kekayaan ekonomi dalam kerangka pembangunan. Ini menunjukkan bahwa proyek geotermal tidak hanya mengubah keadaan fisik, tetapi juga berimplikasi pada nilai sistem dan cara orang memahami ruang hidup mereka.

Secara keseluruhan, transformasi sosial di Sokoria memiliki berbagai dimensi dan berlangsung simultan di berbagai level. Proyek geotermal berperan sebagai pendorong eksternal yang mempercepat penerapan logika pembangunan modern ke dalam kerangka sosial setempat. Analisis perubahan sosial dalam studi ini menitikberatkan pada perubahan struktur sosial, lembaga, relasi masyarakat, dan sistem nilai yang muncul akibat hadirnya proyek geotermal di Sokoria. Analisis terhadap perubahan itu menggunakan perspektif Soerjono Soekanto untuk memahami dinamika transformasi sosial yang terjadi secara bertahap namun komprehensif. Perubahan sosial di Sokoria mencerminkan adanya transformasi struktural yang tidak hanya berpengaruh pada aspek fisik pembangunan, tetapi juga mengubah konfigurasi sosial warga. Kehadiran aktor luar memperkaya struktur sosial lokal yang sebelumnya cukup homogen menjadi lebih kompleks dan berlapis.

Pada waktu yang sama, lembaga adat mengalami perubahan karena keputusan mengenai penggunaan ruang tidak sepenuhnya bergantung pada sistem tradisional. Ini mengindikasikan adanya pergeseran kekuasaan tanpa menghapus keabsahan institusi sosial tradisional. Di tingkat interaksi sosial, komunitas tidak lagi memiliki kesamaan pandangan terhadap proyek pembangunan, yang menunjukkan adanya fragmentasi persepsi. Sementara itu, perubahan nilai tanah menunjukkan pergeseran dari orientasi budaya ke arah ekonomi. Secara keseluruhan, perubahan sosial di Sokoria adalah proses transformasi yang multidimensi akibat masuknya logika pembangunan baru ke dalam struktur sosial setempat, yang selanjutnya mengubah hubungan, institusi, dan cara masyarakat memahami ruang hidup. Transformasi struktur sosial, hubungan kekuasaan, pandangan terhadap lahan, dan pola interaksi warga menunjukkan bahwa proyek geotermal tidak hanya membawa perubahan ekonomi, tetapi juga mengubah tatanan sosial masyarakat Sokoria. Transformasi itu kemudian menjadi landasan munculnya ketegangan sosial, perbedaan tujuan, dan terbentuknya gerakan sosial sebagai respons masyarakat terhadap perubahan yang sedang terjadi.

2. Korelasi dengan Teori Konflik Sosial

Dinamika sosial di Sokoria tidak hanya menciptakan perubahan, tetapi juga memunculkan konflik sosial yang bersifat struktural dan berlapis. Perselisihan ini timbul akibat ketidakseimbangan kekuasaan dan perbedaan kepentingan antar pihak yang terlibat dalam proyek geotermal. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik sosial berasal dari ketidakadilan dalam distribusi otoritas. Di Sokoria, perusahaan dan pemerintah memegang kekuasaan dominan dalam keputusan, sementara masyarakat lokal memiliki akses informasi dan partisipasi yang terbatas. Informasi yang tidak merata memperburuk ketegangan itu. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang tujuan jangka panjang proyek, pengaruh terhadap lingkungan, serta cara distribusi manfaat. Perbedaan penafsiran ini menyebabkan munculnya ketidakpercayaan dalam masyarakat. Konflik di Sokoria terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu konflik tersembunyi, konflik yang terlihat, dan konflik dalam masyarakat. Di samping itu, ada bentrokan kepentingan antara logika pembangunan yang berfokus pada investasi dan logika kehidupan masyarakat yang berlandaskan agraria.

Menurut Lewis Coser, konflik tidak hanya merusak, tetapi juga memiliki peran sosial. Di Sokoria, konflik berfungsi sebagai sarana untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan memperluas pembicaraan publik tentang dampak pembangunan. Konflik sosial di Sokoria dianggap sebagai akibat dari ketidaksetaraan dalam struktur kekuasaan dan penyebaran informasi selama proses pembangunan geotermal. Analisis ini memanfaatkan pandangan Ralf Dahrendorf dan Lewis Coser untuk menginterpretasikan konflik sebagai fenomena yang bersifat struktural dan fungsional dalam masyarakat. Agar hubungan antara temuan lapangan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini lebih jelas, diperlukan pemetaan analitis untuk menunjukkan hubungan antara data empiris, konsep teoritis, dan hasil penelitian sebelumnya secara sistematis. Konflik sosial di Sokoria terjadi karena transparansi otoritas antara pihak negara, perusahaan, dan masyarakat. Ketimpangan ini diperkuat oleh minimnya akses informasi yang mengakibatkan perbedaan pemahaman terhadap proyek.

Konflik dapat muncul tidak hanya secara terbuka, tetapi juga secara laten yang terlihat dari berkurangnya kepercayaan masyarakat. Konflik juga muncul sebagai area perbedaan kepentingan antara logika ekonomi pembangunan dan logika kehidupan yang berfokus pada agraria. Keterlibatan aktor luar memperluas dimensi konflik dari tingkat lokal ke ruang publik yang lebih besar, sehingga konflik tidak hanya bersifat struktural tetapi juga sosial serta kultural. Oleh karena itu, konflik di Sokoria adalah konflik struktural yang bersifat multidimensi, yang tidak hanya mencerminkan ketidakadilan kekuasaan di masyarakat, tetapi juga menjadi tempat pengungkapan kepentingan dan perubahan nilai di dalamnya.

3. Korelasi dengan Teori Gerakan Sosial

Respon masyarakat terhadap konflik di Sokoria tidak hanya berupa ketegangan, tetapi juga berkembang menjadi aksi sosial. Gerakan ini timbul sebagai wujud aksi bersama untuk mengatasi keterbatasan partisipasi, ketidakjelasan informasi, dan ketidakpuasan terhadap proses pembangunan. Gerakan sosial berawal dari pembicaraan santai di kalangan masyarakat yang menciptakan kesadaran bersama tentang efek proyek geotermal. Perkembangan gerakan semakin kokoh ketika aktor eksternal seperti PMKRI, aktivis lingkungan, dan jaringan keagamaan ikut serta. Dalam sudut pandang Struktur Peluang Politik, gerakan sosial berkembang akibat minimnya partisipasi dalam ruang formal pengambilan keputusan. Dalam situasi tersebut, warga mencari cara lain untuk mengungkapkan kepentingan.

Gerakan sosial di Sokoria dipahami sebagai tanggapan bersama masyarakat terhadap pembatasan keterlibatan dan ketidakadilan informasi dalam proses pengembangan geotermal. Melalui sudut pandang Struktur Peluang Politik, Framing, dan Mobilisasi Sumber Daya, gerakan sosial di Sokoria muncul sebagai usaha masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya di tengah minimnya partisipasi dalam pembangunan geotermal. Gerakan ini muncul dari ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak proyek, khususnya yang berkaitan dengan lahan, lingkungan, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dukungan dari organisasi seperti PMKRI, jaringan sosial, dan media sosial juga berperan dalam memperkuat mobilisasi serta penyebaran isu ke ranah publik. Selain itu, isu geotermal dipresentasikan sebagai masalah keadilan sosial dan hak komunitas lokal, yang mendorong terciptanya solidaritas masyarakat.

Gerakan sosial di Sokoria berawal dari kesadaran kolektif yang timbul melalui dialog antarwarga, lalu berkembang menjadi aksi bersama berupa penyampaian aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pembangunan. Partisipasi aktor luar memperkuat kemampuan gerakan dengan dukungan jaringan, legitimasi etis, dan penguatan narasi permasalahan. Dalam situasi ini, terbatasnya partisipasi, rendahnya transparansi, dan ketidakpuasan terhadap proses pengembangan. Perbedaan cara pandang terhadap proyek geotermal juga memperkuat mobilisasi sosial, terutama saat isu pembangunan dianggap sebagai ancaman terhadap ruang hidup dan keadilan sosial. Aksi sosial di Sokoria menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya merespons perubahan secara reaktif, tetapi juga secara proaktif menciptakan ruang untuk mengartikulasikan kepentingan melalui tindakan kolektif yang terhubung dengan jaringan sosial yang lebih luas.

4. Korelasi dengan Teori Respon Masyarakat

Warga Sokoria memberikan tanggapan yang berbeda terhadap proyek geotermal. Tanggapan mereka dipengaruhi oleh pengalaman hidup, kepentingan ekonomi, informasi yang tersedia, dan seberapa dekat hubungan mereka dengan wilayah yang terkena proyek. Sebagian besar dari mereka yang terlibat dalam proyek ini melakukannya dengan harapan memperoleh pekerjaan, infrastruktur yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Namun, ada juga yang menolak karena cemas terhadap efek lingkungan, perubahan pada habitat mereka, serta melemahnya tradisi dan hubungan sosial. Mereka merasa bahwa proyek geotermal dapat mengancam kehidupan mereka. Di samping itu, terdapat kelompok masyarakat yang memilih untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Mereka mengungkapkan harapan, meminta keterbukaan, dan ingin berpartisipasi dalam pembicaraan mengenai pembangunan. Adaptasi tercermin dalam usaha mereka untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi.

Dalam teori respons sosial, variasi sikap masyarakat ini menggambarkan bahwa reaksi terhadap pembangunan berbeda-beda bagi setiap individu. Reaksi ini dipengaruhi oleh cara masyarakat memandang keuntungan, bahaya, dan tempat mereka dalam proses pembangunan. Reaksi masyarakat Sokoria dapat dipahami sebagai adaptasi sosial terhadap perubahan dalam struktur sosial, relasi kekuasaan, dan area kehidupan yang terpengaruh oleh proyek geotermal. Respon masyarakat di Sokoria menunjukkan bahwa pembangunan tidak mengundang reaksi seragam di kalangan masyarakat. Perbedaan respons terjadi akibat masyarakat memiliki pengalaman sosial, kepentingan, dan sudut pandang yang berbeda terkait proyek geotermal. Dalam konteks ini, penerimaan, penolakan, negosiasi, dan adaptasi adalah bentuk reaksi sosial yang muncul secara bersamaan dalam proses perubahan sosial yang sedang terjadi.

5. Integrasi Temuan

Dinamika sosial di Sokoria menunjuka bahwa perubahan sosial, konflik sosial, dan gerakan sosial adalah proses yang memiliki keterkaitan yang kuat dalam konteks pembangunan geotermal. Ketiga hal ini tidak berlangsung secara terpisah, tetapi berkembang bersamaan dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Sokoria. Keterkaitan antara ketiga aspek tersebut terlihat dari pelaksanaan kebijakan pembangunan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan, distribusi informasi, dan keterlibatan masyarakat. Saat ini, proyek geotermal tidak hanya menghasilkan perubahan ekonomi dan sosial, tetapi juga menimbulkan perbedaan pendapatan, ketegangan sosial, dan respon masyarakat secara kolektif. Dengan demikian, dinamika sosial di Sokoria dapat dimaknai sebagai suatu proses yang mengaitkan perubahan struktur sosial, munculnya konflik, dan berkembangnya gerakan sosial sebagai respon masyarakat terhadap perubahan yang terjadi di Sokoria.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dinamika konflik kebijakan eksploitasi geotermal di Desa Sokoria menunjukkan bahwa proyek geotermal tidak hanya berkaitan dengan penyediaan energi dan pembangunan fisik, tetapi juga membentuk proses sosial-politik yang melibatkan relasi kuasa antara masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan. Konflik muncul karena adanya ketimpangan otoritas, asimetri informasi, perbedaan kepentingan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gerakan sosial yang berkembang secara bertahap, mulai dari percakapan informal, pembentukan kesadaran kolektif, penyampaian aspirasi, hingga advokasi yang melibatkan organisasi mahasiswa, aktivis lingkungan, dan kelompok keagamaan. Respons masyarakat terhadap proyek geotermal juga beragam, mulai dari menerima, bersikap kritis, hingga menolak. Perbedaan respons tersebut dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, akses informasi, posisi sosial, kedekatan dengan wilayah terdampak, serta cara pandang masyarakat terhadap tanah, lingkungan, dan pembangunan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai konflik geotermal dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya melalui studi komparatif di beberapa wilayah atau dengan menggali lebih dalam pengalaman kelompok terdampak, tokoh adat, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. Bagi praktisi pembangunan dan pengelola proyek geotermal, penting untuk memperkuat komunikasi publik, transparansi informasi, pemetaan dampak sosial, serta pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pada tingkat kebijakan, pemerintah perlu memastikan bahwa pengembangan energi terbarukan tidak hanya berorientasi pada target pembangunan, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat lokal, dan mekanisme penyelesaian konflik yang adil, partisipatif, serta berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Sokoria, tokoh adat, pemerintah desa, aktivis PMKRI, aktivis lingkungan, serta seluruh pihak yang telah memberikan informasi, dukungan, dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada rekan akademik dan reviewer atas masukan serta saran konstruktif yang membantu penyempurnaan naskah ini.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, GJ (2003). *Pola-pola gerakan lingkungan dan konflik sumber daya alam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afiff, S. (2015). Gerakan sosial lingkungan di Indonesia dan dinamika advokasi masyarakat. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 17(2), 145-160.
- Ajzen, I. (1991). Teori perilaku terencana. *Perilaku Organisasi dan Proses Pengambilan Keputusan Manusia*, 50(2), 179-211.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2023). *Laporan advokasi masyarakat adat terkait proyek geotermal di Flores*. Jakarta: AMAN.
- Aprilianto, F., & Ariefianto, MD (2021). Pengembangan energi panas bumi dalam mendukung transisi energi nasional di Indonesia. *Jurnal Energi dan Lingkungan*, 12(1), 45-58.
- Arnstein, SR (1969). Tangga partisipasi warga. *Jurnal Institut Perencana Amerika*, 35(4), 216-224.
- Bowen, GA (2009). Analisis dokumen sebagai metode penelitian kualitatif. *Jurnal Penelitian Kualitatif*, 9(2), 27-40.
- Chambers, R. (1994). Penilaian partisipatif pedesaan (PRA): Analisis pengalaman. *Pembangunan Dunia*, 22(9), 1253-1268.
- Creswell, JW (2014). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran* (edisi ke-4). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dahrendorf, R. (1959). *Kelas dan konflik kelas dalam masyarakat industri*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Denzin, NK, & Lincoln, YS (2018). *Buku pegangan Sage tentang penelitian kualitatif* (edisi ke-5). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Finlay, L. (2002). Menegosiasikan rawa: Peluang dan tantangan refleksivitas dalam praktik penelitian. *Penelitian Kualitatif*, 2(2), 209-230.
- Fox, JA (2007). Hubungan yang tidak pasti antara transparansi dan akuntabilitas. *Development in Practice*, 17(4-5), 663-671.
- Fung, A. (2006). Variasi partisipasi dalam tata kelola kompleks. *Public Administration Review*, 66, 66-75.
- Harefa, M., & Harmoko, U. (2021). Konflik kebijakan energi dan dinamika sosial masyarakat lokal dalam pengembangan energi terbarukan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 101-118.
- IPCC. (2021). *Perubahan iklim 2021: Dasar ilmu fisika*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2023*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Laporan status hidup lingkungan Indonesia tahun 2022*. Jakarta : KLHK.
- Kincheloe, JL, & McLaren, P. (2005). Memikirkan kembali teori kritis dan penelitian kualitatif. Dalam NK Denzin & YS Lincoln (Ed.), *The Sage handbook of qualitative research* (hlm. 303-342). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Mempelajari keterampilan wawancara penelitian kualitatif* (edisi ke-2). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Lincoln, YS, & Guba, EG (1985). *Penyelidikan naturalistik*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- McCarthy, JD, & Zald, MN (1977). Mobilisasi sumber daya dan gerakan sosial: Sebuah teori parsial. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212-1241.

- Miles, MB, Huberman, AM, & Saldaña, J. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber metode* (edisi ke-3). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Patton, MQ (2015). *Metode penelitian dan evaluasi kualitatif* (edisi ke-4). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Proyek Multatuli. (2024). *Konflik geotermal dan masyarakat lokal di Flores* . Jakarta: Proyek Multatuli.
- Radio Republik Indonesia. (2025). *Aksi penolakan dan dinamika proyek panas bumi di Kabupaten Ende* . Jakarta: RRI.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi* . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Slovic, P. (1987). Persepsi risiko. *Sains* , 236(4799), 280-285.
- Snow, DA, & Benford, RD (1988). Ideologi, resonansi kerangka kerja, dan mobilisasi partisipan. *Penelitian Gerakan Sosial Internasional* , 1, 197-217.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Spradley, JP (1980). *Observasi partisipan* . New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Stake, RE (1995). *Seni penelitian studi kasus* . Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Suchman, MC (1995). Mengelola legitimasi: Pendekatan strategis dan institusional. *Academy of Management Review* , 20(3), 571-610.
- Sztompka, P. (2007). *Sosiologi perubahan sosial* . Jakarta: Prenada Media.
- Tarrow, S. (2011). *Kekuasaan dalam gerakan: Gerakan sosial dan politik yang penuh konflik* (edisi ke-3). Cambridge: Cambridge University Press.